

PENILAIAN			PENJELASAN	PILIHAN JAWABAN	2018	%	BUKTI DUKUNG
A.	PROSES (60)						
	II.	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)			0	5,00	100,00%
		1 Harmonisasi (2,5)			0	2,50	100,00%
		a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron				
			b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron	A/B/C	A	1	<p>1. Identifikasi, analisa, dan pemetaan peraturan perundang-undangan bidang kominfo tahun 2005-2011; dan</p> <p>2. Identifikasi, analisa, dan pemetaan peraturan perundang-undangan bidang kominfo tahun 2012- 2017</p> <p>Selain itu, dalam rangka Reformasi Regulasi telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan untuk mengurangi jumlah regulasi bidang Kominfo:</p> <p>1. Undangan, Absensi, Laporan</p> <p>2. Nota Dinas ke Menteri</p> <p>3. Rekapitulasi penelaahan regulasi</p>
			c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron				
		b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron	a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis				<p>Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis:</p> <p>A. Rekapitulasi Revisi Peraturan Perundang-Undangan Pada Tahun Tahun 2017-2018</p> <p>Kelengkapan persyaratan berupa:</p> <p>1. Rapat koordinasi (Undangan, Daftar Hadir, Laporan);</p> <p>2. Konsultasi publik melalui website Kementerian Kominfo;</p> <p>3. Kajian/policy paper; dan</p> <p>4. Paraf Koordinasi.</p>
			b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai	A/B/C	A	1	
			c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron				
		2 Sistem pengendalian dalam penyusunan			0	2,50	100,00%

PENILAIAN				PENJELASAN			PILIHAN JAWABAN			2018	%	BUKTI DUKUNG
			a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi	a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikan b. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikan c. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikan d. Belum ada persyaratan tersebut	A/B/C/D	A	1				Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan telah diimplementasikan dan persyaratan lengkap, didukung dengan: 1. Surat Edaran Sekjen No 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kominfo (dalam rangka revisi untuk penyempurnaan) 2. SOP penyusunan peraturan perundang-undangan.	
			b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tidak berkala c. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	A/B/C	A	1				Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkala 3 bulan sekali pada TA. 2017-s.d April 2018, yaitu: 1. Und, Absensi, dan Laporan (B03) TA. 2017; 2. Und, Absensi, dan Laporan (B06) TA. 2017; 3. Und, Absensi, dan Laporan (B09) TA. 2017; 4. Und, Absensi, dan Laporan (B12) TA. 2017; 5. Und, Absensi, dan Laporan (B03) TA. 2018;	

TAMBAHAN											
Peningkatan layanan JDih Kominfo Layanan Website: jdih.kominfo.go.id mendapat penghargaan “ Pengelola JDih Terbaik di tingkat Kementerian/Lembaga ” dari BPHN selaku Pengelola JDih Nasional.										1. Laporan Tahunan Pengelolaan Website JDih Kominfo Tahun 2017. 2. Memperoleh penghargaan dari BPHN selaku Pusat JDih Nasional sebagai pengelola JDih terbaik tahun 2017. 3. Buku Himpunan Peraturan Menteri Kominfo Tahun 2016-2017	